BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Kesehatan Kinerja Realisasi APBDes Di Wilayah Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018-2022, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Derajat Desentralisasi yang dimana dalam Indikator Kesehatan Fiskal terdapat realisasi PAD / Total Pendapatan yang dimana sesuai dengan rumus, secara rata-rata nilai rasio pemerintah desa selama tahun 2018-2022 mempunyai tingkat kemampuan sangat rendah untuk melakukan desentralisasi, Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah desa kurang baik dalam melaksanakan otonomi daerah dikarenakan mempunyai rata-rata nilai rasio berada di 0%-10%.
- 2) Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Efisiensi, Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul dari 7 desa yang peneliti nilai menghasilkan rata-rata nilai dalam lima tahun yang dimulai pada tahun 2018-2022 menghasilkan lima desa mendapatkan keterangan kurang efisien yaitu Desa Jatiayu, Desa Karangmojo, Desa Bendungan, Desa

- Kelor dan Desa Bejiharjo dan dua desa mendapatkan keterangan tidak efisien yaitu Desa Wiladeg dan Desa Gedangrejo.
- 3) Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Efektivitas, Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul dari 7 desa yang peneliti nilai menghasilkan rata-rata nilai dalam lima tahun yang dimulai pada tahun 2018-2022 menghasilkan satu desa memiliki kemampuan kurang efektif yaitu Desa Bejiharjo, satu desa memiliki kemampuan cukup efektif yaitu Desa Wiladeg, dua desa memiliki kemampuan efektif yaitu Desa Jatiayu dan Desa Kelor, tiga desa memiliki kemampuan sangat efektif yaitu Desa Karangmojo, Desa Bendungan, dan Desa Gedangrejo.
- 4) Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui Rasio Kemandirian Keuangan secara rata-rata nilai rasio pemerintah desa selama tahun 2018-2022 mempunyai tingkat kemandirian yang rendah sekali dan mempunyai hubungan Instruktif dengan pemerintah pusat yang dimana dalam tingkat hubungan instruktif pemerintah pusat memiliki peran yang sangat dominan dalam melakukan otonomi daerah dan pemerintah desa memiliki peran yang kecil dalam melakukan otonomi daerah, hal ini dikarenakan dalam rata-rata nilai rasio pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo mempunyai nilai rasio berada di antara 0%-25%,
- 5) Kinerja Pemerintah Desa di wilayah Kapanewon Karangmojo jika dilihat melalui trend Tingkat Pertumbuhan PAD dan Total Pendapatan,

Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul dari 7 desa yang peneliti nilai menghasilkan trend PAD dan Total Pendapatan dalam lima tahun yang dimulai pada tahun 2018-2022 yang dimana ada pemerintah desa mengalami trend yang pertumbuhan dan penurunan baik PAD maupun Total Pendapatan. Untuk PAD yang mengalami trend yang pertumbuhan adalah pemerintah Desa Karangmojo, pemerintah Desa Wiladeg, pemerintah Desa Bendungan dan pemerintah Desa Kelor, sedangkan untuk PAD yang mengalami trend penurunan adalah pemerintah Desa Jatiayu, pemerintah Desa Bejiharjo dan pemerintah Desa Gedangrejo. Untuk Total Pendapatan semua desa di wilayah Kapanewon Karangmojo mengalami trend pertumbuhan Total Pendapatan.

B. Impikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat oleh peneilti, maka peneliti mencoba untuk memberikan implikasi yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Peneliti memberikan kontribusi atas pengembangan ilmu dibidang ilmu dibidang yang diteliti dimana mengenai kinerja keuangan desa

2. Implikasi Praktis

 Pemerintah desa di wilayah Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada di wilayah desa dan menemukan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan meningkatkan PADes, melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dalam berbagai aspek sehingga dapat mengoptimalkan manajemen dan potensi desa yang dimana akan membuat desa menjadi lebih maju dan dapat membangun desa. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan efisiensi dalam belanja dengan cara mengurangi belanja yang tidak terlalu diperlukan sehingga pemerintah desa dapat mengoptimalkan dengan menggunakan keuangan desa untuk membangun desa sehingga akan menghasilkan pendapatan. Pemerintah desa dapat membuat membuat program yang dapat meningkatkan PADes dengan cara program pengenalan tempat wisata di wilayah desa sehingga dapat meningkatkan PADes dan pendapatan masyarakat.

2) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, dan APIP diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa agar pemerintah desa menggunakan dana desa menjadi efektif, tepat sasaran dan efisien sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan dan kemajuan di desa mereka sehingga dengan adanya pembangunan dan kemajuan di desa, sehingga masyrakat dapat merasakan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Pemerintah Kabupaten dan APIP dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pemerintah desa sehingga dapat meminimalkan penyimpangan/kesalahan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Kabupaten dan APIP

diharapkan dapat membangun sistem pengendalian intern pemerintahan desa yang kuat sehingga semua potensi-potensi yang bisa menimbulkan permasalahan hukum bisa dideteksi

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam hasil penelitian ini, memiliki keterbatasan penelitian yang didapatkan hal itu adalah :

- Teknik pengambilan data hanya berdasarkan dokumentasi dan observasi langsung.
- 2. Objek hanya dilakukan di satu kecamatan.

D. Rekomendasi Untuk Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan, implikasi dan keterbatasn penelitian, hal ini menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjunya :

- 1. Diharapkan melakukan wawancara dengan perangkat desa.
- 2. Diharapkan dapat memperluas wilayah objek penelitian.